



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA TRANSFER DALAM
PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI SEKTOR
UMKM
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

RISZVI SETYANI

NPM 21901091149



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Riszvi Setyani, 2023, NPM 21901091149, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM (Studi Pemerintah Kabupaten Malang). Dosen Pembimbing I: Dr. Affifuddin S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II: Taufiq Rahman Ilyas S.AP., M.AP

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya sektor kesehatan, banyak sektor lain yang juga terdampak terutama sektor perekonomian. Kondisi perekonomian mengalami guncangan yang cukup hebat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Kondisi ini menuntut pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan dan pemulihan agar kondisi perekonomian Indonesia dapat diselamatkan dan tidak sampai mengalami krisis. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan ini salah satunya melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kemudian dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi ini pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Malang. Sebagaimana wilayah Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hal ini tentu tidak lepas dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Malang baik pertanian, pariwisata, hingga sektor industri seperti UMKM. Tetapi saat pandemi terjadi tidak memungkiri kondisi perekonomian di Kabupaten Malang juga mengalami penurunan, sehingga pemerintah Kabupaten Malang juga berupaya membuat berbagai kebijakan dalam melakukan pemulihan ekonomi salah satunya melalui pemulihan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang, serta mengetahui permasalahan- permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pemulihan ekonomi tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada analisisnya peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yaitu melalui empat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion* sebagaimana dikemukakan Miles Huberman (2014:12-14).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang sudah baik hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 yang banyak didominasi oleh sektor industri seperti umkm. Hal ini cukup membuktikan bahwa sektor UMKM mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah bahkan negara. Meskipun dalam pengembangannya masih mengalami permasalahan seperti permodalan dan pemasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemulihan Ekonomi, UMKM

SUMMARY

Riszvi Setyani, 2023, NPM 21901091149, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Post-Pandemic Economic Recovery Policy Through the MSME Sector (Malang Regency Government Study). Supervisor I: Dr. Affifuddin S.Ag., M.Si, Supervisor II: Taufiq Rahman Ilyas S.AP., M.AP

The Covid-19 pandemic has had a very detrimental impact on various countries, including Indonesia. Not only the health sector, many other sectors are also affected, especially the economic sector. Economic conditions experienced a severe contraction which caused economic growth to decline. This condition requires the government to make various handling and recovery efforts so that Indonesia's economic condition can be saved and does not experience a crisis. Various policies were made by the government to overcome this problem, one of which is through the PEN (National Economic Recovery) program written in Law No.1 of 2020 and government Regulation No.23 of 2020 concerning state financial policy and financial system stability to deal with the Covid pandemic -19 in order to face threats that endanger the national economy and financial system stability. Then, in carrying out economic recovery efforts, the central government together with regional governments, one of which is Malang Regency. As the Malang Regency area itself is a very strategic area with continuously increasing economic growth. This certainly cannot be separated from the wealth of natural resources that Malang Regency has, including agriculture, tourism, and industrial sectors such as MSMEs. However, when the pandemic occurred, it cannot be denied that the economic conditions in Malang Regency also experienced a decline, so the Malang Regency government also tried to make various policies to carry out economic recovery, one of which was through the recovery of UMKM.

This research aims to determine the implementation of the post-pandemic economic recovery policy through the MSME sector in Malang Regency, as well as finding out the problems faced by the government in realizing this economic recovery policy. In order to achieve this goal, researchers used qualitative research with a descriptive approach. In the analysis, the researcher used George C. Edward III's implementation theory, namely through four factors: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The data analysis used in this research is data collection, data condensation, data display, and conclusion as stated by Miles Huberman (2014: 12-14).

The results of this research show that the implementation of economic recovery policies in Malang Regency has been good, this is proven by the increase in economic growth in 2022, which is dominated by the industrial sector such as MSMEs. This is enough proof that the MSME sector is able to spur regional and even national economic growth. Although in its development it still experiences problems such as capital and marketing.

Keywords: Implementation, Policy, Economic Recovery, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pertama kali muncul di Wuhan China pada tahun 2019, virus corona telah menyebar ke 15 negara. Di Indonesia sendiri awal pandemi Covid 19 ditetapkan sejak 2 maret 2020 dan pada tanggal 13 maret presiden Jokowi mengeluarkan Keppres No 12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional dan Keppres No 7/2020 tentang penetapan Gugus tugas (SATGAS) untuk percepatan penanganan Covid-19. Kemudian hingga hari ini Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 6.729. 756 orang dan membunuh sekitar 160. 810 orang serta sekitar 6.564. 669 orang dinyatakan sembuh (Kemenkes RI). Kemudian dalam menangani masalah tersebut pemerintah menetapkan kebijakan *lockdown* melalui PSBB (Pembatasan Sosial Beskala Besar). Dimana berdasarkan kebijakan tersebut seluruh aktivitas manusia di wilayah tertentu yang terdampak covid-19. Akibatnya banyak tempat-tempat hiburan ditutup seluruh aktivitas manusia dilakukan dirumah (WFH) seperti sekolah, bekerja dan lainnya. Kegiatan pembatasan ini tentu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap semua sektor terutama sektor perekonomian.

Dalam hal ini sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang paling terganggu. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka meretas penyebaran covid-19 yang telah menimbulkan berbagai krisis dan resesi dunia, mulai dari berhentinya kegiatan ekonomi, terbatasnya perdagangan ekspor impor,

banyaknya perusahaan industri yang gulung tikar, hingga ancaman pengangguran yang meningkat akibat PHK yang terjadi selama pandemic. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukan (Jhingan 2000:57). Di Indonesia sendiri kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan Year on Year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5.07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami pertumbuhan sebesar 3,49 %, sedangkan pada triwulan keempat mengalami pertumbuhan sebesar 2,19%.

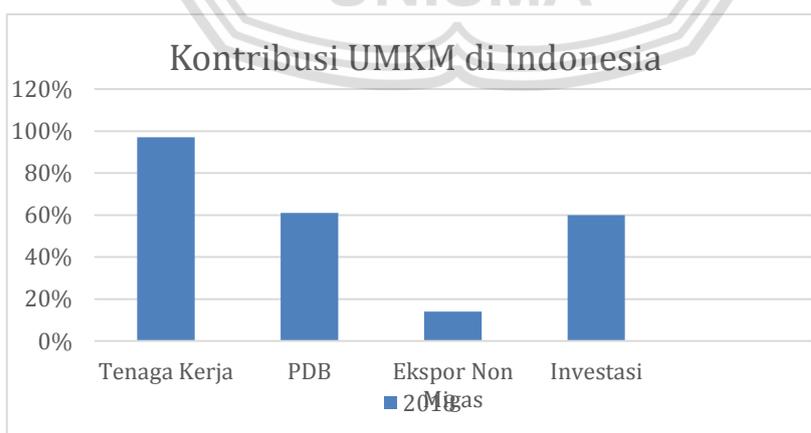
Sebagai penanggulangan dari dampak pandemic Covid-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) serta Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemic Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara

meliputi, pendapatan negara baik dari sektor perpajakan, belanja negara, dan keuangan daerah. Sedangkan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan masalah lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Seiring menurunnya kinerja ekonomi akibat pandemic, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan lainnya selama pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 terjadi resesi ekonomi dunia, dimana resesi tersebut dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia sendiri juga mengalami resesi meskipun dalam skala ringan (*mild recession*) karena kontraksi ekonomi yang terjadi hanya sekitar -3% - 0%. Prediksi tersebut tentu membuat pemerintah optimis untuk terus melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini karena pemerintah daerah yang lebih memahami terkait kondisi struktur perekonomian daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Disamping itu kebijakan dapat disinergikan dalam menunjang pemulihan ekonomi nasional.

Kemudian dampak dari penurunan perekonomian ini tentu dipengaruhi juga oleh sektor UMKM, dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia

sangat besar dalam berbagai bidang antara lain, jumlah unit usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 juta (99,9%), kontribusi pada jumlah tenaga kerja, dimana jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 juta (97%), kemudian kontribusi pada PDB, jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%). Selanjutnya kontribusi terhadap Ekspor NonMigas jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%), serta kontribusi terhadap investasi, jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%) (Thaha, 2020). Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa sektor UMKM dapat menjadi kunci dalam pengamanan ekonomi nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis.



Gambar 1.1 Grafik kontribusi UMKM di Indonesia tahun 2018

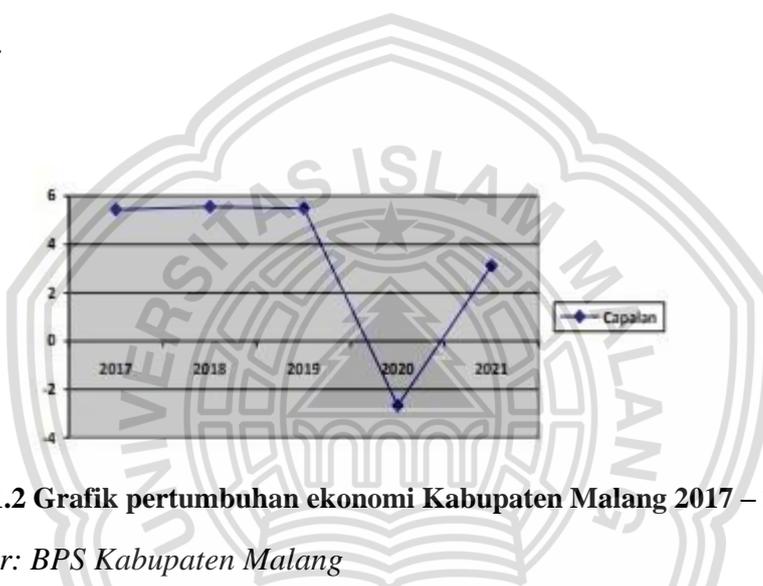
Sumber: Data kontribusi UMKM di Indonesia

Dalam hal ini sektor UMKM juga mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan *lockdown* yang menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, yang mengakibatkan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia, sehingga lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar (Thaha, 2020). Sektor UMKM dinilai paling terdampak akibat adanya pandemi ini, dimana sektor UMKM yang mampu melakukan perputaran produksi setiap harinya. Sehingga apabila sektor UMKM tidak dapat lagi menopang perekonomian akibat pandemi ini maka perekonomian Indonesia juga akan mengalami penurunan yang signifikan.

Kemudian salah satu daerah di Indonesia yang terdampak Covid19 adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Kondisi perekonomian di Kabupaten Malang sendiri dari tahun ketahun menunjukkan fluktuasi, hal ini dibuktikan dengan adanya PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. Di Kabupaten Malang penyumbang perekonomian terbesar didominasi oleh sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan perdagangan. Dimana jumlah lahan pertanian terus mengalami peningkatan serta jumlah pariwisata yang terus bertambah sehingga juga mempengaruhi produksi UMKM dan perdagangan di Kabupaten Malang.

Selama periode 2017-2019 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Malang sebesar 5,43 %, kemudian di tahun 2018 sebesar 5,56%, dan pada tahun 2019 sebesar 5,5% lebih lambat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kondisi perekonomian di Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar - 2,68% akibat pandemic covid-19, meskipun di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 3,12%. Pencapaian ini merupakan upaya pemerintah dalam membangkitkan ekonomi masyarakat akibat pandemic covid-19 (RLPPD Kab. Malang).



Gambar 1.2 Grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang 2017 – 2021

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Berdasarkan data tersebut sejak beberapa tahun terakhir sebelum pandemi kondisi perekonomian di Kabupaten Malang semakin meningkat. Sejumlah sektor usaha semakin mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kabupaten Malang mampu memperlihatkan akselerasi perekonomian yang kuat, baik dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan perdagangan. Misalnya dari sektor pertanian berdasarkan berita yang ditulis dalam berita Jatim Bupati Malang H. Muhammad Sanusi mengatakan bahwa, untuk unggulan tanaman pangan di Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi padi dengan hasil panen pada Tahun 2018 sebesar 498.051 ton, jagung sebesar 270.881 ton, kedelai sebesar 17069. Sementara

komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang, dimana pemasarannya telah menembus pasar-pasar di Kota Malang.

Kemudian dalam melakukan pemulihan perekonomian berdasarkan regulasi dari Kebijakan otonomi daerah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pembangunan dan pertumbuhan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kemudian dari sektor UMKM, dimana berdasarkan hasil Sensus Ekonomi (Susenas) pada tahun 2016 dan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) pada tahun 2018, terdapat sebanyak 600.054 UMKM dan menyerap tenaga kerja sebanyak 646.448 tenaga kerja. Di masa pandemi Covid-19, jumlah UMKM Kabupaten Malang per 31 Juli 2020 berkurang menjadi 425 ribu. Penurunan jumlah UMKM ini memberikan dampak besar bagi perekonomian Implementasi kebijakan yang dibuat dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi selalu diupayakan pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi kebijakan yang sesuai mampu menciptakan tujuan yang unggul, dikarenakan dalam melakukan proses implementasi yang didalamnya terdapat tahapan yang paling penting sebagai proses pelaksanaan program. Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting yang mampu memberikan apakah kebijakan bisa membantu pemerintah dan benar- benar sudah sesuai yang apabila nantinya diimplementasikan di lapangan mampu memberikan

output atau outcomes sesuai dengan yang telah direncanakan. Semua keputusan-keputusan mengenai kebijakan pasti memiliki banyak rentetan proses baik administrasi atau adanya tahap birokrasi maupun politik yang memang rumit tetapi mampu menggerakkan keseluruhan instansi atau pemerintah yang berkaitan, seperti halnya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. masyarakat terutama di desa. (Fizriyani, 2020). Hasil kajian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terhadap 686 UMKM selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang dialami UMKM di Kabupaten Malang akibat pandemi Covid-19 adalah penjualan turun sebesar 44%, permodalan turun sebesar 27%, distribusi terhambat sebesar 12%, kesulitan bahan baku 9%, mengalami masalah produksi sekitar 8%, mengalami penurunan omzet penjualan UMKM yang mencapai 77,6%, dan penurunan aset mencapai 42,7% serta pengurangan tenaga kerja mencapai 46,1%.

Kemudian di era *New Normal* ini pemerintah Kabupaten Malang juga terus berupaya merumuskan kebijakan dalam melakukan pemulihan ekonomi melalui penyusunan grand design agar menjadi salah satu kerangka dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai inovasi- inovasi terkait dengan program pemulihan ekonomi Kabupaten Malang dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya, melalui pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan kepala keluarga, dukungan kegiatan dalam rangka digitalisasi di bidang pendidikan, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, pengadaan benih/bibit ternak sapi potong dan sapi perah, serta penjaminan

ketersediaan sarana budidaya ikan dan kegiatan lainnya yang mendukung pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang.

Dalam hal ini kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah diwujudkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021. Dimana dana transfer umum ini merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Kemudian dana transfer umum ini digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan serta dukungan pendidikan. Meskipun pada kenyataannya hal ini belum juga maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam PERDA NO 14 Tahun 2018 tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021”, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Malang belum setara, khususnya keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi warga miskin, penyandang disabilitas, dan wilayah pedesaan terpencil. Hal ini dibuktikan dengan angka putus sekolah yang masih tinggi, berdasarkan berita yang ditulis oleh malang posco media

pada Mei 2023 menyatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang masih timpang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji juga tak menampik bila indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang terbilang anjlok. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah adalah masalah sosial ekonomi, kenakalan remaja, lingkungan yang tidak mendukung serta rendahnya kesadaran orang tua maupun siswa untuk mengenyam pendidikan terutama di wilayah pinggiran.

- b. Kualitas infrastruktur masih menjadi persoalan khususnya dalam mendukung peningkatan aktivitas perekonomian Kabupaten Malang pada sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jalan yang rusak parah di wilayah Kabupaten Malang, padahal akses jalan merupakan faktor yang cukup dalam mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat. Misalnya saja jalan menuju pantai selatan yang nilai rusak parah dan mengakibatkan jumlah wisatawan masih stagnan meskipun pandemic sudah dianggap berakhir. Berdasarkan berita yang ditulis oleh Blitar Times pada April 2023 kepala Unit Pantai Balekambang Perumda Jasa Yasa, Yasdi mengatakan bahwa menurunnya minat kunjungan wisatawan ke pantai selatan disebabkan karena akses jalan yang rusak parah. Selain berlubang akses jalan juga bergelombang serta dipenuhi bebatuan, belum lagi kondisi jalan yang berbelok dan naik turunan curam.

- c. Rendahnya kualitas angkatan kerja, yang disebabkan rasa semangat berwirausaha bagi angkatan kerja menurun serta banyaknya PHK akibat pandemi. Berdasarkan berita yang ditulis jawa pos , terdapat sekitar 21.949 lulusan SMK/ Sederajat yang masih menganggur. Sementara lulusan kampus yang menganggur berjumlah 2.173 orang. Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo juga tak menampik, tingginya angka pengangguran disebabkan karena lapangan kerja yang tersedia belum sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- d. Produktivitas pertanian belum maksimal, khususnya tanaman pangan akibat kondisi iklim yang tidak menentu sehingga banyak mengakibatkan petani gagal panen.
- e. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan melakukan pelatihan- pelatihan baik administrasi atau teknis.
- f. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin terutama kecukupan energi, air bersih, dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah terpencil dan sentra kemiskinan belum terealisasi secara adil dan menyeluruh.

Kemudian dalam mewujudkan pemulihan ekonomi pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM. Dimana sektor UMKM inilah yang memiliki potensi besar dan perlu untuk terus diperkuat sehingga implementasinya dapat berjalan maksimal dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian di Kabupaten Malang. Perlunya upaya kebijakan pemerintah yang benar- benar dapat membuat UMKM dapat tetap

bertahan di segala situasi terutama disaat pandemic dan new normal seperti saat ini. Dalam hal ini kebijakan pemerintah Kabupaten Malang dan implementasinya bagi para pelaku UMKM pasca pandemic menjadi fokus utama dalam mewujudkan kebijakan pemulihan ekonomi.

Kemudian diEra- New Normal ini pemerintah terus melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan berbagai kebijakan- kebijakan baru. Pemerintah perlahan mencabut kebijakan PSBB dan masyarakat mulai menjalani aktivitasnya sedikit demi sedikit dengan normal, khususnya juga bagi para pelaku UMKM. Dimana hal ini adalah kesempatan baru bagi mereka untuk terus meningkatkan usahanya serta melakukan pemulihan ekonomi yang sempat tersendat akibat adanya pandemic. Diera New Normal ini para pelaku UMKM harus mampu menciptakan strategi usaha dengan melakukayusunan strategi marketing dan pendekatan dalam mencari peluang dan adaptasi dengan kebiasaan baru. Dalam hal ini para pelaku usaha dituntut untuk dapat menciptakan strategi bisnis yang nantinya dapat memulihkan penjualan dan mampu meningkatkan perekonomian pasca krisis akibat pandemic.

Dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya berperan dalam menjaga UMKM agar mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemic covid-19 dengan membuat kebijakan agar UMKM mampu mempertahankan usahanya. Langkah penyelamatan ini merupakan salah satu wujud program strategi dan dukungan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Implementasi kebijakan pemerintah di lapangan perlu mendapat perhatian agar tepat sasaran. Meskipun begitu masih banyak permasalahan- permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan

menengah, berikut adalah permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kabupaten Malang dilihat dari berbagai aspek:

- a. Penguatan aspek produksi: Di Kabupaten Malang masih banyak perusahaan UMKM yang mengalami masalah mengenai aspek produksi misal saja masalah permodalan sebagai contoh permasalahan pengembangan UMKM di desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, yaitu masih mengalami masalah mengenai permodalan, pemasaran, dan kualitas produk. Dimana dalam masalah permodalan mereka belum ada keteraturan pembukuan, sehingga sulit mengajukan pembiayaan modal ke lembaga keuangan. Kemudian pemberian modal yang belum tepat sasaran, yaitu hanya kepada warga yang semangat melaksanakan bisnis musiman ketika ada bantuan. Selain itu modal juga terhambat karena sistem penjualan produk UMKM masih menggunakan sistem penitipan (konsiyasi) di toko-toko. Kemudian adanya program BPUM yang dicanangkan pemerintah sebagai bentuk dukungan dan bantuan pada para pelaku UMKM masih belum merata, banyak dari pelaku UMKM yang belum menerima terutama bagi mereka yang gaptek.
- b. Pengembangan kapasitas SDM: Di Kabupaten Malang para pelaku usaha UMKM juga masih perlu melakukan pelatihan- pelatihan serta sosialisasi dari pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak SDM yang kurang memahami cara mengolah perusahaan baik dari sistem produksi hingga pemasaran Sebut saja misalnya permasalahan dari segi kualitas produk, beberapa produk UMKM di Desa Palaan belum mempunyai izin resmi dan

sertifikasi halal serta beberapa pelaku UMKM kurang memperhatikan kualitas bahan baku produk dan aspek perlindungan konsumen. Hal ini juga terjadi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dimana masih banyak para produk- produk UMKM yang berupa makanan belum bersertifikasi halal. Inilah perlunya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM.

- c. Pemasaran produk: Dari segi pemasaran produk banyak dari para pelaku UMKM di Kabupaten Malang yang belum menguasai bagaimana cara memasarkan produk- produk mereka. Banyak dari para pelaku UMKM yang memasarkan produknya masih dengan cara manual secara door to door dengan sistem pesanan dan hanya dititipkan pada toko- toko terdekat serta pusat pemasaran UMKM yang didirikan pemerintah (PLUT) tempatnya belum strategis. Selain itu juga banyak dari para pelaku UMKM yang masih gaptek, dimana masih banyak para pelaku usaha yang masih belum paham dalam memanfaatkan teknologi untuk promosi barang- barang mereka. Banyak dari mereka yang belum mengetahui aplikasi- aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran digital usaha mereka. Kemudian dalam hal pemasaran mereka juga masih perlu pendampingan dari pemerintah mengingat produk- produk mereka yang masih kalah dengan produksi pabrik yang dibandrol dengan harga lebih murah. Sebagaimana informasi yang dilansir dari berita Malang Times.

Dari hal ini para pelaku UMKM berharap kedepannya pemerintah Kabupaten Malang bisa memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM, sehingga produk yang dihasilkan mampu dipasarkan lebih luas lagi dan bisa meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk lokal. Kemudian sebagaimana berita yang ditulis dalam Malang Times politisi Demokrat Kabupaten Malang, Bintang Oerip Hidayatullah menilai bahwa pendampingan oleh pemerintah perlu dimaksimalkan lagi, terutama dalam pemasaran dan suntikan modal. Selain itu menurutnya pemerintah perlu melakukan pelatihan- pelatihan yang menysasar seluruh masyarakat.

Kemudian pemerintah Kabupaten Malang juga akan terus melakukan upaya-upaya dengan menciptakan berbagai kebijakan baru serta melakukan evaluasi pada implementasi kebijakan tersebut dengan memberikan edukasi- edukasi dan memberikan tempat ruang dengan harapan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa meninggalkan protokol kesehatan sehingga pemerintah tetap bisa memantau arus usaha dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus melakukan upaya pemulihan ekonomi agar mampu menjadi bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Dana Transfer Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Malang)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana transfer dalam pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang pasca pandemic Covid-19?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan dana transfer dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi perekonomian di Kabupaten Malang pasca pandemic Covid-19.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca baik langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

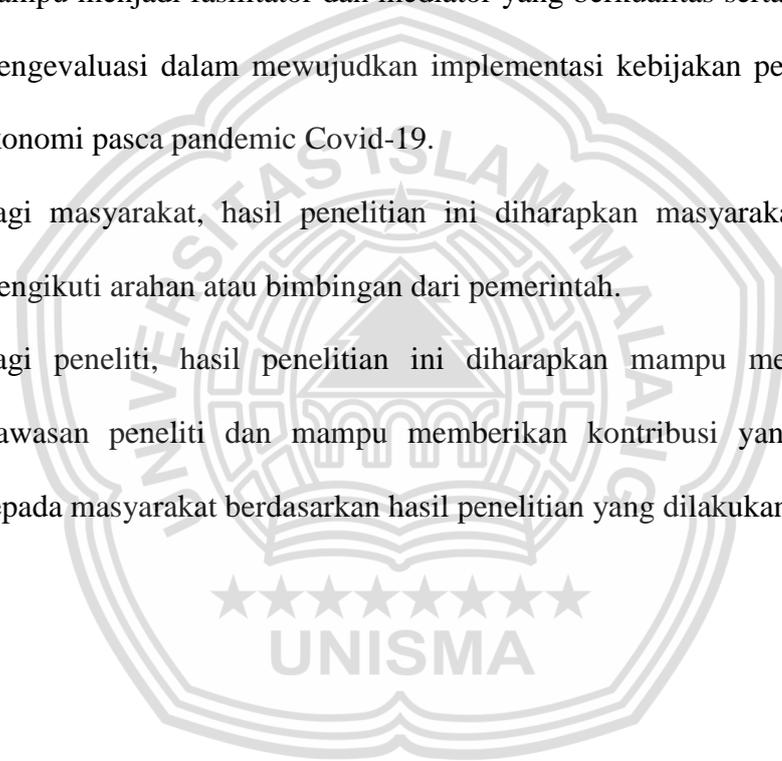
Secara teoritis penelitian dapat bermanfaat sebagai upaya kontribusi dan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat dalam rangka

melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM pasca terdampak pandemic Covid-19.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah mampu menjadi fasilitator dan mediator yang berkualitas serta mampu mengevaluasi dalam mewujudkan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengikuti arahan atau bimbingan dari pemerintah.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti dan mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM di Kabupaten Malang diwujudkan melalui pengelolaan dana transfer umum yang bertujuan mendukung program pemulihan ekonomi daerah, dengan melihat indikator sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan dan Kondisi Perekonomian Kabupaten Malang

Pasca diterpa pandemic atau di era *new normal* ini kondisi perekonomian Kabupaten Malang terus menunjukkan arah positif. Hal ini tentu dapat memacu pembangunan ekonomi, aktivitas ekonomi, dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data PDRB pada tahun 2021 kenaikan yang terjadi banyak didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Berdasarkan data tersebut kondisi perekonomian Kabupaten Malang akan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023. Kondisi ini tentu tidak lepas dari peranan pemerintah pusat yang terus memberikan stimulus baik dari sisi fiskal atau moneter, serta kemudian juga tidak lepas dari peranan sektor UMKM yang juga semakin maju dan meningkat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

b. Komunikasi

Faktor komunikasi, dalam mewujudkan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang sudah baik. Seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat, provinsi daerah dan dinas- dinas hingga tingkat terbawah seperti desa dan kelurahan bekerja sama dengan baik. Berbagai kegiatan sosialisasi atau program lainnya yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi terus diberikan kepada masyarakat baik dari pemerintah kabupaten langsung maupun dari dinas- dinas terkait, hingga akhirnya banyak masyarakat yang menerima dan mengikuti program- program kegiatan tersebut.

c. Sumber Daya

Adapun indikator- indikator yang ada pada sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (Staff).

Dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang, seluruh pegawai dan staff sudah cukup baik dan mumpuni dalam mengerjakan tugasnya masing- masing. Hal ini karena adanya kegiatan pelatihan bagi para pegawai pemerintah terutama para asn dalam meningkatkan kompetensi bidang kerjanya sebagaimana

termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 14 Tahun 2018.

2. Sumber Daya Finansial

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang, kondisi finansial menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang tentu mendapat dukungan atau bantuan dari Pemerintah Pusat baik bantuan secara langsung atau tidak, salah satunya melalui dana transfer umum. Kemudian bagi para pelaku usaha juga banyak mendapat bantuan dari pemerintah baik BPUM atau lainnya yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kembali produksinya.

d. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang, sikap dari implementor atau pemerintah sudah cukup baik. Pemerintah dan stakeholder lainnya dalam hal ini selalu siap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, berupaya mewujudkan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya juga masih menghadapi pro dan kontra dari masyarakat akan adanya kebijakan yang dibuat. Tetapi pemerintah dan stakeholder lainnya terus berkoordinasi dalam

melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan dari kebijakan yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran.

e. Struktur Birokrasi

Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang baik, tentu membutuhkan adanya SOP dalam menjalankan tugas di masing- masing pihak. Kemudian dalam mewujudkan kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang ini berpedoman pada undang- undang, peraturan presiden, peraturan daerah atau peraturan bupati, seperti pada Peraturan Bupati Malang No.13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah. Kemudian adapun SOP dan rencana kerja dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam membantu mewujudkan pemulihan UMKM di Kabupaten Malang juga telah diatur dalam renstra tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati No. 110 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian pada strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Malang, dilihat dari tiga indikator yaitu sebagai berikut:

a. Penguatan Akses Produksi

- Faktor permodalan masih menjadi masalah utama bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Malang, meskipun sudah

banyak bantuan yang diberikan pemerintah tetapi hal tersebut belum cukup mampu untuk menutupi biaya produksi. Hal ini disebabkan karena dari sisi SDM masih belum cukup mumpuni dalam mengelola keuangan dan mengatur manajemen bisnis.

- Bahan baku yang tersedia sistemnya masih by order, dalam artian para pelaku UMKM masih belum menyediakan bahan baku dalam jumlah banyak. Hal ini juga disebabkan karena jumlah modal yang dimiliki juga terbatas, sehingga mereka hanya menyediakan bahan baku hanya sesuai dengan kebutuhan produksi saja.

b. Pengembangan Kapasitas SDM

- Dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi oleh para pelaku UMKM, pemerintah berupaya untuk terus mendorong para pelaku usaha tersebut agar terus mengembangkan usahanya dengan mengadakan berbagai kegiatan pelatihan atau sosialisasi baik pelatihan sdmnya, kelembagaannya, produksinya, hingga pelatihan mengenai digital marketingnya dan pemasaran.

- Dalam penguasaan teknologi UMKM di Kabupaten Malang sudah cukup update dalam memanfaatkannya terutama untuk pemasaran, hanya saja masih belum konsisten dalam melakukan kegiatan promosi. Dari segi produksi kebanyakan para pelaku UMKM masih manual atau menggunakan tenaga manusia karena untuk pemberdayaan masyarakat.

- Untuk pengembangan produk UMKM di Kabupaten Malang kebanyakan sudah memiliki produk turunan. Misalnya pengusaha tempe yang sudah mengembangkannya menjadi kerupuk tempe dan masih banyak lagi lainnya.

c. Pemasaran Produk

- Di Kabupaten Malang, pemasaran juga masih menjadi masalah utama bagi pengembangan UMKM. Dimana masih banyak pelaku UMKM yang melakukan pemasaran secara door to door.
- Kemudian kualitas barang hasil produksi UMKM sudah hamper sama dengan produk pabrikan hanya saja minat konsumen lebih tertarik kepada produk pabrikan.
- Kemudian dalam melakukan promosi para pelaku UMKM masih belum konsisten baik dalam promosi secara langsung maupun dari media sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk terus bersinergi dan bekerjasama dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi yang terus stabil dan meningkat serta menangani berbagai isu- isu strategis yang ada baik isu politik maupun sosial budaya hingga nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

2. Diharapkan bagi pemerintah untuk terus mengadakan kegiatan pelatihan pegawai guna untuk terus mengasah skill dan kemampuan yang kompeten serta profesional dalam menjalankan dan mengerjakan tugasnya.
3. Dari segi penguatan akses produksi para pelaku usaha tentunya diharapkan mampu meningkatkan skillnya terutama dalam mengelola manajemen keuangan agar masalah keterbatasan modal dapat teratasi dan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga proses produksi akan lebih berjalan efektif.
4. Dari segi pengembangan SDM pemerintah diharapkan terus dan sering mengadakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan kepada para pelaku usaha baik pelatihan mengenai produksi hingga pemasaran serta melakukan pendampingan langsung secara berkala. Dari pelaku usahanya sendiri diharapkan mampu untuk terus menggali dan melakukan inovasi dari produk yang mereka ciptakan.
5. Dari segi pemasaran diharapkan bagi pemerintah lebih memfasilitasi bagi para pelaku usaha untuk dapat memasarkan produknya, seperti adanya swalayan atau supermarket bagi produk UMKM dan lainnya, serta mengadakan kegiatan pameran atau pasar rakyat bagi produk UMKM. Kemudian bagi para pelaku usaha harus sering- sering mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan pemerintah maupun lainnya guna terus menggali skill terutama dalam melakukan pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Malang, B. K. (2023). *kabupaten malang dalam angka 2023*. BPS Kab. Malang.
- Malang, B. K. (2023). *Produk domestik regional bruto kabupaten malang menurut lapangan usaha 2018-2022*.
- H, T. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung: D.M.Paskarina. Ed.
- Islamy, I. (1984). *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: penerbit CV. Mandar Maju.
- Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Saldana, M. &. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. . Jakarta: Citra Utama Pertama. Jakarta: Binapura Aksara.

Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, A. M. (2005). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. . Jakarta: Kencana.

Jurnal

Andi Setyo Pambudi , Muhammad Fikri Masteriarsa , Aditya Dwi Febri Christian Wibowo , Imroatul Amaliyah , dan Adhitya Kusuma Ardana. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19.

Andjar Prasetyo , Tomo Hadi Saputro, Amsal, Ray Septianis Kartika. (2021). Pemulihan Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu.

Anonymous. (2012). *Buku Pembelajaran Kebijakan Pemerintah*. Universitas Pattimura.

Anwar., H. (2022). Strategi Pemulihan Umkm Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Tarakan.

Edy., S. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Umkm Dan Pariwisata.

Ilyas, T. R. (2017). Perencanaan Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Kecil, Menengah (Umkm) Ekonomi Kreatif. *Thesis, Universitas Brawijaya*.

Karta, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19. <https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/download/40/25/>. Diakses pada 26 januari 2023.

Nadya ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan. (2021). Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta. *Vol 2 No.5*.

Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Putra, A. E. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Septiana Nurul Izzati, A. Fakhrrur Rozi, Romli Muar. (2019). Analisis Masalah dan Solusi Prioritas Pengembangan UMKM. *Vol.3 No.1 2019*, 1-16.

Sulastri, Umi Nuraini, Ferby Mutia Edwy. (2023). Literasi Halal Sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Umkm Di Kabupaten Malang. *vol.2*, 17-24.

Supartoyo, Y. H. (2022). Arah Kebijakan Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Structural Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Dasar Hukum/ Undang- Undang

Undang- Undang No 1 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi covid-19 dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan daerah kabupaten malang nomor 24 tentang RPJMD Kabupaten malang tahun 2021.

Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Peraturan Bupati Malang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Rencana Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022.

Peraturan Bupati Malang Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2023.

Dokumen

Dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, (RLPDD Kab. Malang).

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2016-2021.

Internet/ Artikel

Anggraeni., P. (2020). Tetap Eksis Selama Pandemic Industry Umkm Di Kabupaten Malang Harapkan Bantuan Modal. <https://www.malangtimes.com/baca/61179/20201208/162200/tetap-eksis-selama-pandemi-industri-umkm-di-kabupaten-malang-harapkan-bantuan-modal>. Diakses pada 15 Mei 2023.

Damayanti., A. W. (2021). Kondisi Perekonomian Indonesia Ditengah Pandemi. <https://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/>Diakses pada 25 januari 2023, .

Ishaq., L. (2023). Akses Jalan Rusak Menuju Wisata di Kabupaten Malang. . <https://blitar.jatimtimes.com/baca/287957/20230420/125900/akses-jalan-rusak-menuju-wisata-di-kabupaten-malang-bakal-diperbaiki-mei-2023>. Diakses pada 15 Mei 2023. .

Kebudayaan., K. K. (2019). Pembatasan Sosial Berskala Besar. . <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>, Diakses pada 25 januari 2023.

Malangkab.go.id, diakses pada 25 Januari 2023.

Media, M. P. (2023). Angka Putus Sekolah Masih Tinggi. <https://malangposcomedia.id/angka-putus-sekolah-masih-tinggi/>. Diakses pada 15 Mei 2023.

RI, K. K. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>. Diakses pada 25 februari 2022.

RI., K. K. (2023). Data terinfeksi virus covid-19. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>. Diakses pada 25 januari 2023.

Yudistira, W. S. (2023). Lulusan SMA/ SMK di Kabupaten Malang Menganggur. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kabupaten-malang/27/02/2023/di-kabupaten-21-949-lulusan-sma-smk-menganggur/>. Diakses pada 15 Mei 2023.

